

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mega Mustika, Sri Fadilah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

megamustikaaa.mm@gmail.com, srifadilah03@gmail.com

Abstract—The characteristic of a financial statement is one that must be met in order for the financial statement to succeed. A successful financial statement will certainly be very beneficial for the entity. Likewise for the government, the government that succeeded in carrying out their duties certainly succeeded in producing good financial reports. Thus, the purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the regional financial accounting system and government accounting standards on the quality of financial statements conducted on the Cimahi City SKPD with a total of 50 respondents. Data collection techniques in the form of questionnaires and data sources used are primary data, and the analysis tool uses multiple linear regression analysis because it has more than 2 variables. Thus, the results of this study are: 1) The application of Regional Financial Accounting System does not affect the Quality of Financial Statements in the City of Cimahi SKPD, 2) The application of government accounting standards has a significant effect on the Quality of Financial Statements in the City of Cimahi SKPD.

Keywords—Regional financial accounting system, government accounting standards, financial report quality.

Abstrak—Karakteristik sebuah laporan keuangan merupakan salah satu yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut berhasil. Sebuah laporan keuangan yang berhasil tentunya akan sangat menguntungkan bagi entitas tersebut. Begitu juga bagi pemerintah, pemerintah yang berhasil menjalankan tugasnya tentu berhasil juga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada SKPD Kota Cimahi dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dan alat analisisnya menggunakan analisis regresi linear berganda karena memiliki lebih dari 2 variabel. Dengan begitu, hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Cimahi, 2) Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Cimahi.

Kata kunci—Sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan.

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, sebuah alat pengawasan dan pelaporan akuntansi sektor publik akan terus berkembang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Sudah banyak di beberapa negara memberikan dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan akuntansi pada sector publik contohnya seperti pemerintahan, khususnya di Indonesia sendiri. Untuk itu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal yang penting untuk saat ini. Pelayanan yang terbaik sekarang menjadi tuntutan bagi pemerintah agar senantiasa tanggap akan lingkungannya.

Pemerintah yang berhasil dalam tugasnya yaitu pemerintah yang mencapai tujuan yang telah direncankannya. Dalam mencapai tujuan itu, sumber daya yang ada di pemerintahan tersebutlah yang menjadi upaya pemerintah dalam mencapai tujuannya, salah satu sumber daya tersebut adalah keuangan. Untuk mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, sebuah laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengambilan keputusan diambil dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah oleh para pemangku kepentingan.

Untuk itu dalam sebuah organisasi membutuhkan pengendalian internal untuk mendukung kinerja organisasi tersebut [1-2]. Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Pernyataan Standar Audit No 115, menyatakan bahwa pencapaian tujuan terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku merupakan hasil dari mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lainnya untuk memengaruhi sebuah proses yang dirancang untuk memberikan sebuah jaminan yang wajar terhadap tujuan tersebut, ini merupakan pengertian dari penendalian internal [3]. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa keandalan pelaporan keuangan merupakan salah satu tujuan dalam proses pengendalian internal.

Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan sistem akuntansi dalam proses pengendalian internal. Pemerintah yang disebut dengan organisasi sektor publik yang mana sebuah organisasi yang mengelola masyarakat tersebut, harus mampu memberikan pertanggungjawabannya melalui laporan keuangannya. Dengan begitu, pemerintah membutuhkan sistem akuntansi yang baik agar permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dapat teratasi. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan, sistem akuntansi harus dipahami agar tidak menghambat sebuah laporan keuangannya.

Laporan keuangan yang baik pula harus sesuai dengan standar. Standar dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mana merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah [4]. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya banyak pemerintahan yang belum paham mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan juga standar akuntansi pemerintahan tersebut. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut mendapat penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dapat dilihat terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, banyak sekali permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangannya. Dalam laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017, BPK menemukan 18 kelemahan yaitu diantaranya 13 kelemahan pada terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) ([5]; [6]). Bahkan di tahun yang sama, yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu laporan keuangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ([7]; [8]).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu, 1) Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan? dan 2) Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan?. Dilihat dari rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini yaitu, 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, dan 2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

II. LANDASAN TEORI

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pengelolaan (*Stewardship*). Teori tersebut menunjukkan bahwa manajemen lebih mementingkan hasil kepentingan organisasi dari pada tujuan individu [9]. Teori ini dapat diterapkan pada organisasi sector publik seperti pemerintahan [10]. Dimana pemerintah tersebut selaku pengelola sumber daya dan

rakyat selaku pemilik, yang keduanya menjalin kesepakatan sesuai dengan tujuan organisasi berdasarkan kepercayaan kolektif. Tujuan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang contohnya seperti laporan keuangan. Untuk itu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah harus mengungkapkannya secara rinci terkait data-data akuntansi sesuai kebenarannya. Dan implikasi teori dalam penelitian ini bagaimana pemerintah tersebut melaksanakan tugasnya dengan tepat.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentunya harus memiliki sistem akuntansi. Sistem akuntansi digunakan sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya. Sistem akuntansi yang baik akan mencegah kerurangan surtu organisasi atau entitas. Sistem akuntansi yang digunakan pemerintah yaitu sistem keuangan daerah yang mana sistem tersebut merupakan prosedur pencatatan akuntansi dalam rangka pelaksanaan APBD yang sesuai prinsip-prinsip akuntansi. ([11]; [12]). Ada tiga tujuan pokok yang dimiliki sistem akuntansi keuangan daerah yaitu, pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Indikator untuk sistem akuntansi penelitian ini yaitu, diantaranya kesesuaian dengan Standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan Standar pencatatan yang berlaku Umum, dan pembuatan laporan keuangan secara periodik [13].

Dan untuk Standar yang digunakan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan pemerintah yaitu Standar akuntansi Pemerintahan yang merupakan standar yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya berupa sebuah prinsip atau pedoman. ([14]; [15]). Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terdiri dari: PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas, PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan., PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan, PSAP No. 06 Akuntansi Investasi, PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP No. 12 Laporan Operasional [16].

Untuk semua organisasi pemerintahan tentunya menginginkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang baik. Tentunya laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan yang mendasarkan pada karakteristik kualitatif ([17]; [18]; [19]; [20]). Karakteristik tersebut antara lain, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek pada penelitian ini yaitu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan

menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sumber datanya adalah data primer dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner yang disebarkan telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Cimahi dan sampelnya adalah seluruh staf bagian keuangan. Dengan begitu peneliti menjadikan seluruh populasi yang ada sebagai sampel karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek. Sampel yang diolah pada penelitian ini sebanyak 50 responden.

A. Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah tabel untuk menjelaskan hasil analisis linear berganda dan uji t yang diolah menggunakan SPSS:

TABEL 1. HASIL ANALISIS LINEAR BERGANDA DAN UJI T

COEFFICIENTS^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.344	3.331		1.904	.063
X ₁	.296	.188	.243	1.571	.123
X ₂	.205	.079	.402	2.595	.013

a. Dependent Variable: Y

Untuk hasil analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel B, yang diperoleh persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,344 + 0,296X_1 + 0,205X_2 + e$$

Yang mana dari persamaan tersebut dihasilkan beberapa interpretasi yaitu, diantaranya untuk interpretasi yang pertama adalah nilai konstanta sebesar 6,344 yang artinya tanpa adanya variabel X₁ dan X₂ maka Y memiliki nilai sebesar 6,344, yang kedua adalah nilai koefisien regresi X₁ adalah sebesar 0,296, yang artinya jika X₁ meningkat dan X₂ konstan maka Y akan meningkat sebesar 0,296, dan yang terakhir adalah nilai koefisien regresi X₂ adalah sebesar 0,205, yang artinya jika X₂ meningkat dan X₁ konstan maka Y akan meningkat sebesar 0,205.

Dapat di lihat dari tabel sebelumnya, bahwa uji t dapat dilihat dari nilai signifikan pada tabel tersebut yaitu untuk variabel X₁ sebesar 0.123 yang lebih besar dari 0,05 (0,123>0,05) dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). dan untuk variabel X₂ dapat dilihat dari nilai signifikannya juga yaitu sebesar 0.013 yang kurang dari 0,05 (0,013>0,05) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya Penerapan Standar akuntansi pemerintahan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Berikutnya adalah tabel Uji F yang diolah yang diolah menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat ataukah tidak.

TABEL 2. HASIL UJI F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	317.074	2	158.537	12.524	.000 ^b
Residual	594.967	47	12.659		
Total	912.041	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₂, X₁

Dasar pengambilan keputusan untuk uji f adalah apabila Sig. < 0,05. Jika dilihat dari tabel hasil uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000. Dari nilai tersebut dapat terlihat bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel X₁ dan X₂ secara bersamaan akan berpengaruh terhadap variabel Y.

Berikutnya adalah tabel untuk hasil koefisien determinasi yang diolah menggunakan SPSS:

TABEL 3. HASIL KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.590 ^a	.348	.320	3.557932

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Untuk rumus yang digunakan adalah:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Dilihat dari tabel tersebut, untuk melihat nilai koefisien determinasi melihat tabel (R-Square) yang hasilnya sebesar 0.348 atau setelah dimasukan rumus menjadi 34,8%. Artinya, besarnya pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y adalah sebesar 34,8%.

B. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil uji regresi secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,123 yang berarti nilai Sig. > 0,05. Artinya bahwa

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum melakukan penelitian.

Hal ini dikarenakan SKPD di Kota Cimahi belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam membuat laporan keuangan yang salah satunya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila laporan keuangan tersebut menerapkan Sistem akuntansi keuangan daerah, maka laporan keuangan yang diharapkan menghasilkan sebuah catatan dan laporan transaksi keuangan yang lebih terpercaya, sehingga pemakai laporan keuangan mengambil keputusan dengan baik. Hal ini juga diasumsikan bahwa staf keuangan pada SKPD Kota Cimahi belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan sistem akuntansi yang sesuai. Maka dari itu SKPD Kota Cimahi perlu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi para staf dalam membuat atau menyusun laporan keuangan dengan baik.

Hal ini pun tidak sejalan dengan teori pengelolaan pada penelitian ini, dimana teori pengelolaan tersebut diasumsikan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang sangat kuat. Dalam hal ini SKPD Kota Cimahi belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam membuat laporan keuangannya, yang artinya SKPD ini belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam melakukan tugas dan fungsinya, dan juga belum melaksanakan pengelolaan sampai pertanggungjawaban keuangannya secara maksimal.

C. Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil uji regresi secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,013 yang berarti nilai Sig. < 0,05. Artinya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum melakukan penelitian.

Hal ini disebabkan karena SKPD di Kota Cimahi sudah menggunakan standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. sehingga penyajian laporan keuangannya sudah benar. Semakin baik penerapan Standar tersebut, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan berkualitas dikarenakan transaksi yang ada dilaporkan sesuai dengan Peraturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan ada pada standar akuntansi pemerintahan.

Hal ini didukung oleh teori pengelolaan, dimana teori pengelolaan tersebut diasumsikan antara kepuasan dan

kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang sangat kuat. Dalam SKPD ini pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan tepat sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik, dan juga sudah mempertanggungjawabkan keuangannya secara maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik ada 2 yaitu diantaranya, 1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Cimahi, dan 2) Penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Cimahi.

V. SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis meliputi 2 aspek, yakni saran teoritis dan saran praktis. Dalam saran teoritis penulis memberikan saran untuk lebih banyak membaca buku yang akan menjadi referensi, supaya lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kualitas laporan keuangan. Saran dalam aspek praktis yaitu yang peneliti harapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait:

A. Bagi Pemerintah

Pertama disarankan pemerintah untuk menerapkan sepenuhnya sistem akuntansi keuangan daerah agar laporan yang disusun atau dibuat akan sesuai dengan prosedur. Kedua, pemerintah juga disarankan agar tetap mempertahankan penyusunan laporan keuangan dengan mengikuti standar yang berlaku.

B. Bagi Peneliti Lain

Pertama diharapkan menambah variabel independen contohnya seperti kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, karena banyak penelitian terdahulu yang memakai variabel tersebut, serta dapat menambah sampel untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Kedua, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadilah, Sri. 2018. Internal Control (Before and after the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP)). Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018). vol 307.
- [2] Fadilah, Sri. 2011 "The Effect of Implementation of Internal Control, Culture Organization and Total Quality Management in the Application of Good Governance and Implications for Organizational Performance with Consumer Trust as an Intervening Variable". Indonesian Journal of Economics and Business IJEB vol. 001.
- [3] Audit of Colleges and University (AICPA), The American Institute of Certified Public Accountants, 1975.

- [4] Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [5] Fitra, Safrezi. 2018. BPK Temukan 18 Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, tersedia di <https://katadata.co.id/berita/2018/05/31/bpk-temukan-18-pemmasalahan-dalham-laporan-keuangan-pemerintah> [31/05/2018].
- [6] R Putri., S Fadilah., Nurhayati. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya). Prosiding Akuntansi. Universitas Islam Bandung. Vol 2, No 2.
- [7] Situmorang, Anggun P. 2018. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali dapat opini disclaimer dan BPK, tersedia di <https://www.merdeka.com/uang/kementerian-kelautan-dan-perikanan-kembali-dapat-opini-disclaimer-dari-bpk.html> [01/06/2018].
- [8] Fadilah, dkk. 2019. Internal Audit Effectiveness: A Case of Indonesia. Journal of Talent Development and Excellence. Vol 12 (2s), 625-638.
- [9] Davis, J.H., Schoorman, F.D., & Donaldson, L. 1997. Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22: 20-47.
- [10] Haliah. 2012. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- [11] H. Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Rasdianto, Erlina. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Penerbit Brama Ardian.
- [13] Permadi, Angga Dwi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemda terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cimahi.
- [14] Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- [15] Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [16] Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [17] S. Munawir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- [18] Prasetya, Gede Edy. 2005. Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi.
- [19] KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] tersedia di <https://kbbi.web.id/kualitas> [21/06/2016].
- [20] Yadiati, dkk. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.